



KABUPATEN LAMONGAN

**PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN**

LAPORAN PENGELOLAAN RESIKO TRIWULAN I

2026





BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Lamongrejo Nomor 92 Lamongan Kode Pos (62217)
Telepon (0322) 321706 E-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id/bakesbangpol/

NO DOKUMEN	:	710/57.1/403.206/2026
TANGGAL TERBIT	:	02 April 2026

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian perencanaan Evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan  <u>NURHAYATI AS'ADAH, S.E., M.Si.</u> 19730402 199901 2 001
Diperiksa	:	Plt. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan  <u>MOHAMMAD ANDI SUWIJI, SH, MM.</u> 19690817 200312 1 007
Disahkan Oleh	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan   <u>JOKO NURSİYANTO, S.H., M.H.</u> 19680114 198801 1 001

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/ pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumber daya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Risiko selalu timbul dari segala aspek kehidupan dan bersinggungan langsung dengan sosial masyarakat. Informasi dan komunikasi yang memungkinkan masyarakat menjangkau dan berinteraksi secara bebas, tentunya dapat memunculkan delik negatif yang menggerus nilai-nilai sosial dan budaya yang telah disadari dan dipatuhi oleh masyarakat. Keberlanjutan nilai sosial, budaya, dan politik perlu dipertahankan dengan asas gotong royong dan kebersamaan, baik antar masyarakat sendiri maupun antara pemerintah dan masyarakat. Sehingga terjadi sinergi positif yang dapat meminimalisir ataupun menghilangkan risiko.

Keberadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Lamongan menjadi sarana untuk mendapatkan informasi, pelayanan, dan pengetahuan dalam kehidupan bermasyarakat. Program yang direncanakan dan diimplementasikan selalu berkaitan erat dengan kondisi terkini yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini merupakan bentuk komitmen dan konsistensi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan sebagai instansi pemerintah yang reaktif dan visioner dalam rangka manajemen resiko.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi

dan peningkatan kinerja ;

- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan I sebagaimana terlampir pada lampiran 1.1.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN I

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan I, Resiko strategis dan Resiko Operasional yang sudah dilaksanakan dapat dilihat sebagaimana terlampir pada lampiran 1.2.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD. Dalam pengelolaan risiko pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan penyesuaian agenda dengan instansi vertikal lainnya seperti KODIM, POLRES, BIN, dan lainnya terutama dalam koordinasi TIMDU pengawasan ORMAS.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan I dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya. Hal ini disebabkan oleh adanya sinergi yang baik antar pemangku kepentingan, sehingga RTP dapat direalisasikan dengan tepat dan akurat sesuai dengan rancangan pemetaan pemantauan risiko.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan I dapat disimpulkan bahwa risiko dapat dikendalikan dengan tepat dan akurat sesuai dengan rancangan pemetaan pemantauan risiko. Sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan peningkatan kewaspadaan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama di daerah rawan konflik.

LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Triwulan I

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
Risiko Strategis OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:							
1	Pembuatan buku saku penanganan konflik sosial Pembentukan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	Monev kegiatan rapat koordinasi, surat undangan dan kehadiran	Kepala Bakesbangpol	1 Bulan sekali (Januari-Desember)	Januari-Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0KIka6wdnm?usp=drive_link	-
2	Menjelaskan tema/ sub tema kegiatan, serta peserta dalam surat permintaan narasumber	Monev dan Surat Permintaan Narasumber	Kepala Bakesbangpo	Triwulan III (September)	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0KIka6wdnm?usp=drive_link	-
3	Program inklusif & fasilitasi khusus	Monev kegiatan	Kepala Bakesbangpol	Desember 2029	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0KIka6wdnm?usp=drive_link	-
4	Kampanye digital & konten kreatif	Monev kegiatan	Kepala Bakesbangpol	Desember 2029	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0KIka6wdnm?usp=drive_link	-
5	Memperluas kampanye pendidikan pemilih melalui media sosial, komunitas, dan tokoh masyarakat	Monev kegiatan	Kepala Bakesbangpol	Desember 2029	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0KIka6wdnm?usp=drive_link	-
6	Petugas Pelayanan memberikan form SKM dengan segera setelah masyarakat mendapatkan pelayanan	Monev Inputan data responden terbaru	Kepala Bakesbangpol	Semester 1 (Juni) dan Semester 2 (Oktober)	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0KIka6wdnm?usp=drive_link	-
7	1) Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2) Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang.	Reviu hasil monev kinerja internal	Kepala Bakesbangpol	Triwulan I s/d IV (Maret, Juni, September, Desember)	Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0KIka6wdnm?usp=drive_link	-
8	Melakukan back up data pelaporan manajemen resiko untuk mengantisipasi kerusakan data pada aplikasi	Evaluasi dokumen hasil back up data pelaporan manajemen resiko	Kepala Bakesbangpol	Triwulan I s/d IV (Maret, Juni, September, Desember)	Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0KIka6wdnm?usp=drive_link	-
9	Melakukan review terhadap efektivitas pengendalian risiko secara berkala	Monitoring pengelolaan risiko	Kepala Bakesbangpol	Januari 2027, April, Juli, Oktober 2026	Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0KIka6wdnm?usp=drive_link	-
Risiko Operasional OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:							
1	Koordinasi	Monev dan pemantauan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	Desember 2026	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0KIka6wdnm?usp=drive_link	-

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
			Agama				
2	Koordinasi lintas OPD	Monev kegiatan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Juni 2026	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
3	Koordinasi dengan semua stakeholder	Monev kegiatan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Juni 2026	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
4	Melibatkan PPI (Purna Paskibraka Indonesia) untuk mengampu Paskibraka	Monev kegiatan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Juni 2026	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
5	Melibatkan Paskibraka atau Capaska untuk ikut dalam sosialisasi	Monev kegiatan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Juni 2026	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
6	Penandatanganan Pakta Integritas panitia seleksi Paskibraka	Monev Daftar Penilaian Calon Anggota Paskibraka	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Juli 2026	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
7	Koordinasi	Monev dan pemantauan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial,	Desember 2026	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
			Budaya dan Agama				
8	Konfirmasi ulang kehadiran narasumber paling lambat sehari sebelum pelaksanaan kegiatan	Monev kegiatan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	September 2026	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
9	Konfirmasi ulang kepada penyedia	Monev dan pemantauan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	November 2026	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
10	Koordinasi dengan pemerintah desa, kejaksaan dan opd terkait lainnya dalam pemantauan aliran kepercayaan	Monev kegiatan, Surat Undangan dan Kehadiran	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	September 2026	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
11	Koordinasi dengan pemerintah desa, kejaksaan dan opd terkait lainnya dalam pemantauan aliran kepercayaan	Monev kegiatan, Surat Undangan dan Kehadiran	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	September 2026	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
12	Membuat telaah staf terkait penambahan dukungan anggaran sesuai dengan Kemendagri Nomor 000.10.3/e-844/polpum untuk disampaikan kepada Bappelitbangda	Monev tindak lanjut telaah staf dukungan anggaran	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Juni 2026	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
13	Pembinaan untuk peningkatan pertanggungjawaban pengelolaan hibah parpol dengan bekerjasama dengan BPKP sebagai narasumber	Monev Kegiatan, Surat undangan dan permintaan, serta kehadiran	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	September 2026	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
14	Pembinaan untuk peningkatan pertanggungjawaban laporan hasil monitoring	Monev kegiatan, Surat Undangan dan Kehadiran	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi	Triwulan I s/d IV (Maret, Juni, September,	Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
			Kemasyarakatan	Desember)			
15	Rapat Koordinasi TIMDU Pengawasan Ormas	Monev kegiatan, Surat Undangan dan Kehadiran	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Triwulan I s/d IV (Maret, Juni, September, Desember)	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	Penyesuaian Jadwal Anggota TIMDU
16	Melakukan sosialisasi peningkatan kemampuan digital kepada Ormas	Monev kegiatan, Surat Undangan dan Kehadiran	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Setiap Bulan 2026	Januari-Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
17	Melakukan pencatatan setiap perubahan draft disertai alasan tertulis	Monev kegiatan, Surat Undangan dan Kehadiran	Sekretaris	Maret 2026	Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
18	Melakukan sistem reward dan punishment terhadap pegawai berprestasi ataupun pegawai yang menyimpang	Monev kegiatan, Surat Undangan dan Kehadiran	Sekretaris	Maret 2026	Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
19	Menetapkan SOP pengumpulan dan verifikasi data wilayah. Menetapkan jadwal pembaruan data setiap bulan. Melakukan verifikasi silang dengan POLRES, KODIM, BIN, dan kecamatan. Membentuk tim supervisi data untuk memastikan akurasi sebelum penyusunan kebijakan	Monev Kegiatan	Kabid Kewaspadaan Nasional & Tim Pengawasan Internal Bakesbangpol	Maret, Juni, September, Desember 2026)	Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
20	menyusun template data, menerapkan deadline wajib lapor, kalender koordinas, penanggung jawab dari tiap instansi	Review Dokumen	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dan kerja sama intelijen	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
21	membuat agenda koordinasi tetap, format masukan wajib, daftar hadir wajib, evaluasi tindak lanjut hasil rapat	Monev Kegiatan	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dan kerja sama intelijen	12 Bulan (Januari-Desember 2026)	Januari-Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
22	Koordinasi dan bekerjasama dengan jajaran samping instansi vertikal seperti KODIM, POLRES, BIN, dan lainnya dalam monitoring wilayah	Monev kegiatan,	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan	1 Bulan sekali (Januari-Desember)	Januari-Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
			Konflik Sosial				
23	Mengimplementasikan sistem pelaporan digital dengan fitur identitas penginput dan catatan perubahan. Melakukan verifikasi silang rutin dengan KODIM, POLRES, BIN, dan perangkat kecamatan. Mewajibkan dua tingkat verifikasi (petugas + koordinator). Mengadakan pelatihan integritas dan anti-fraud bagi seluruh petugas monitoring. Membuat SOP baru tentang pencegahan manipulasi data pelaporan.	Monev kegiatan	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 Bulan (Januari-Desember 2026)	Januari-Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
24	menetapkan format baku laporan, jadwal pengumpulan bahan, rencana tindak lanjut	Review kelengkapan dokumen Forkopimda	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 Bulan (Januari-Desember 2026)	Januari-Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
25	Melakukan back up data pelaporan kinerja Perangkat Daerah untuk mengantisipasi kerusakan data pada aplikasi	Evaluasi dokumen hasil back up data pelaporan kinerja	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
26	Menetapkan jadwal resmi dan wajib dan update data perbulan	Reviu dokumen perencanaan	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
27	Melakukan punishment	Dokumen rencana aksi kegiatan dan evaluasi capaian kinerja	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
28	Meminta desk dengan BPS untuk menyamakan persepsi dan klasifikasi data	Monev hasil desk dan kehadiran	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Juni dan Desember 2026	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
29	Optimalisasi penyusunan rencana anggaran kas dan jadwal rencana kegiatan.	Monev hasil penyusunan rencana anggaran kas dan jadwal rencana kegiatan	Kasubbag Keuangan	Agustus 2026	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
30	Memberikan pengertian kepada PNS Perangkat Daerah	Hasil Koordinasi	Kasubbag Keuangan	Setiap Bulan 2026	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	Bila terjadi Keterlambatan
31	1. Penandatanganan pakta integritas 2. Mewajibkan adanya data dukung berupa foto yang terdapat keterangan lokasi dan waktu	Monev hasil laporan pertanggungjawaban	Kasubbag Keuangan	Setiap Bulan 2026	Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
32	Optimalisasi penyeteroran SPJ dan jadwal kegiatan	Monev hasil laporan	Kasubbag	Setiap Bulan	Januari-Maret	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2ljwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
		pertanggungjawaban	Keuangan	2026	2026	0Klka6wdnm?usp=drive_link	
33	Menyusun dan menerapkan mekanisme sanksi dan reward yang jelas, termasuk kategori pelanggaran, jenis sanksi, dan bentuk penghargaan bagi pegawai disiplin	Rapat sosialisasi internal Bakesbangpol	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Februari 2026	Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
34	Melakukan evaluasi penyusunan rencana kerja pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Monitoring oleh PPK	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	April 2026	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
35	1. Melibatkan seluruh sub bidang dan pejabat pengelola Kepegawaian pada pertemuan koordinasi tertentu untuk mengusulkan kebutuhan diklat dan pelatihan kepada BKPSDM 2. Mengadakan pelatihan dan diklat mandiri untuk seluruh pegawai	Usulan diklat dan monev kegiatan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Maret dan November 2026	Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
36	Pembinaan pegawai internal secara berkala.	Evaluasi hasil pembinaan pegawai internal Bakesbangpol	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
37	Menjaga cadangan komponen listrik	Evaluasi setelah proyek atau kegiatan selesai	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Juni 2026	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
38	Menyusun laporan kondisi barang untuk memberikan rekomendasi kepada pimpinan terkait keberlanjutan penggunaan alat lama	Evaluasi kebutuhan secara periode	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Juni 2026	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
39	Pencocokan data dukung berupa barang yang diterima beserta bukti fotonya	Monev kegiatan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
40	Melakukan audit pemakaian barang secara berkala, termasuk perbandingan permintaan dengan pemakaian	Monitoring dan evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
41	Menerapkan verifikasi dua arah dan setiap informasi perubahan rekening harus disampaikan secara resmi	Laporan terkait jumlah pembayaran yang telah diverifikasi dan temuan ketidaksesuaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
42	Memeriksa kelengkapan dokumen sebelum menyetujui pembayaran atau reimbursement	Laporan monitoring rutin	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
43	Memanfaatkan secara optimal sarana prasarana kantor yang tersedia serta ditunjang dengan kolaborasi dengan pihak terkait	Monev kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
44	Melakukan verifikasi berjenjang	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Januari 2026	Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
45	Memeriksa persediaan barang berdasarkan kondisi barang yang rusak	Hasil daftar kondisi persediaan barang yang ada	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Juni 2026	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
46	Melakukan retur barang sesuai dengan pesanan	Kesesuaian Hasil retur	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
47	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Rapat koordinasi internal	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Juni 2026	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
48	Komunikasi koordinasi internal	Monev bukti pembayaran	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Februari 2026	Februari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
49	Menggunakan checklist standar agar penilaian kerusakan objektif	Pembinaan pegawai internal	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap Bulan	Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
50	Melakukan komplain kepada vendor untuk mengganti dengan tenaga yang kompeten	Tindak lanjut pergantian tenaga kebersihan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Juni 2026	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
51	Pembinaan pegawai oleh atasan langsung terkait tugas dan tanggungjawabnya.	Monev barang milik daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Januari 2026	Januari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
52	Mewajibkan bukti laporan pekerjaan yang lengkap, detail, dan sesuai standar sebagai syarat pembayaran	Monev bukti laporan pendukung	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap Bulan	Maret 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
53	Pemeliharaan preventif dan korektif dan penanggung jawab yang jelas	Menetapkan jadwal perawatan berkala	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Februari 2026	Februari 2026	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-
54	Meminta pertanggung jawaban ke pihak vendor atau penyedia	Evaluasi terhadap hasil pekerjaan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Oktober 2026	-	https://drive.google.com/drive/folders/1fCpHgNF3S2IjwDzVSdqhaO0Klka6wdnm?usp=drive_link	-

Lampiran 1.2 Monitoring Risiko Dan RTP

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:										
1	Risiko Operasional: Terjadi konflik berulang memperdalam polarisasi antar kelompok	RSO.26.05.206.01	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Pembuatan buku saku penanganan konflik sosial Pembentukan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	1 Bulan sekali (Januari-Desember)	Januari-Maret 2026	-
2	Risiko Operasional: Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan tema kegiatan	RSO.26.05.206.02	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Menjelaskan tema/ sub tema kegiatan, serta peserta dalam surat permintaan narasumber	Triwulan III (September)	-	-
3	Risiko Oprasional: Rendahnya partisipasi kelompok rentan (difabel, lansia)	RSO.26.05.206.03	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Program inklusif & fasilitasi khusus	Desember 2029	-	-
4	Risiko Operasional: Rendahnya partisipasi pemilih pemula	RSO.26.05.206.04	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Kampanye digital & konten kreatif	Desember 2029	-	-
5	Risiko Operasional: Rendahnya partisipasi pemilih secara umum	RSO.26.05.206.05	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Memperluas kampanye pendidikan pemilih melalui media sosial, komunitas, dan tokoh masyarakat	Desember 2029	-	-
6	Risiko Operasional: Jumlah responden tidak tercapai	RSO.26.05.206.06	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Petugas Pelayanan memberikan form SKM dengan segera setelah masyarakat mendapatkan pelayanan	Semester 1 (Juni) dan Semester 2 (Oktober)	-	-
7	Risiko Operasional: Implementasi sistem akuntabilitas kinerja internal pemerintah belum berjalan optimal	RSO.26.05.206.07	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	1) Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2) Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang.	Triwulan I s/d IV (Maret, Juni, September, Desember)	Maret 2026	-
8	Risiko Kemitraan: Pelaporan penyusunan manajemen resiko pada sistem informasi pelaporan yang disediakan mitra OPD tidak optimal	RSO.26.05.206.08	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Melakukan back up data pelaporan manajemen resiko untuk mengantisipasi kerusakan data pada aplikasi	Triwulan I s/d IV (Maret, Juni, September, Desember)	Maret 2026	-
9	Risiko Operasional: Penerapan manajemen risiko masih belum optimal	RSO.26.05.206.09	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Melakukan review terhadap efektivitas pengendalian risiko secara berkala	Januari 2027, April, Juli, Oktober 2026	Januari 2026	-
Risiko Operasional OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:										
1	Risiko Operasional: Jumlah laporan tidak sesuai target	ROO.26.05.206.01	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Koordinasi	Desember 2026	-	-
2	Risiko Operasional: Perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan	ROO.26.05.206.02	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Koordinasi lintas OPD	Juni 2026	-	-
3	Risiko Operasional: Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan	ROO.26.05.206.03	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Koordinasi dengan semua stakeholder	Juni 2026	-	-
4	Risiko Kemitraan: Keterbatasan kemampuan mitra	ROO.26.05.206.04	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Melibatkan PPI (Purna Paskibraka Indonesia) untuk mengampu Paskibraka	Juni 2026	-	-
5	Risiko Operasional: Kurangnya minat peserta yang mendaftar untuk mengikuti	ROO.26.05.206.05	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Melibatkan Paskibraka atau Capaska untuk ikut dalam sosialisasi	Juni 2026	-	-

	sosialisasi									
6	Risiko Fraud: Terdapat peserta paskibraka yang tidak sesuai dengan kriteria	ROO.26.05.206.06	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Penandatanganan Pakta Integritas panitia seleksi Paskibraka	Juli 2026	-	-
7	Risiko Operasional: Jumlah laporan tidak sesuai target	ROO.26.05.206.07	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Koordinasi	Desember 2026	-	-
8	Risiko Operasional: Narasumber yang diminta tidak bisa hadir	ROO.26.05.206.08	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Konfirmasi ulang kehadiran narasumber paling lambat sehari sebelum pelaksanaan kegiatan	September 2026	-	-
9	Risiko Fraud: Spesifikasi alkes tidak sesuai dengan perjanjian	ROO.26.05.206.09	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Konfirmasi ulang kepada penyedia	November 2026	-	-
10	Risiko Operasional: Belum terinventarisir secara menyeluruh keberadaan aliran kepercayaan	ROO.26.05.206.10	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Koordinasi dengan pemerintah desa, kejaksaan dan opd terkait lainnya dalam pemantauan aliran kepercayaan	September 2026	-	-
11	Risiko Kemitraan: Kurang maksimalnya kinerja mitra	ROO.26.05.206.11	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Koordinasi dengan pemerintah desa, kejaksaan dan opd terkait lainnya dalam pemantauan aliran kepercayaan	September 2026	-	-
12	Risiko Oprasional: Jumlah peserta tidak memenuhi target	ROO.26.05.206.12	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Membuat telaah staf terkait penambahan dukungan anggaran sesuai dengan Kemendagri Nomor 000.10.3/e-844/polpum untuk disampaikan kepada Bappelitbangda	Juni 2026	-	-
13	Resiko Kemitraan: Ditemukan Ketidaksesuaian prosentase alokasi kegiatan bersumber dana hibah parpol	ROO.26.05.206.13	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Pembinaan untuk peningkatan pertanggungjawaban pengelolaan hibah parpol dengan bekerjasama dengan BPKP sebagai narasumber	September 2026	-	-
14	Resiko Fraud : Laporan Hasil Monitoring dibuat tanpa turun ke lapangan (mark up kunjungan)	ROO.26.05.206.14	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Pembinaan untuk peningkatan pertanggungjawaban laporan hasil monitoring	Triwulan I s/d IV (Maret, Juni, September, Desember)	Maret 2026	-
15	Resiko Kemitraan: Terdapat Ormas yang melakukan tindakan tidak sesuai ataupun melenceng dengan tupoksinya	ROO.26.05.206.15	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Rapat Koordinasi TIMDU Pengawasan Ormas	Triwulan I s/d IV (Maret, Juni, September, Desember)	-	Penyesuaian Jadwal Anggota TIMDU
16	Resiko Operasional : Keterlambatan/lamanya penerbitan surat tanggapan keberadaan ormas	ROO.26.05.206.16	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Melakukan sosialisasi peningkatan kemampuan digital kepada Ormas	Setiap Bulan 2026	Januari-Maret 2026	-
17	Resiko Fraud : Intervensi bahan kebijakan oleh pihak eksternal	ROO.26.05.206.17	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Melakukan pencatatan setiap perubahan draft disertai alasan tertulis	Maret 2026	Maret 2026	-
18	Resiko Fraud: Pemberian imbalan atau hadiah/gratifikasi agar didahulukan/dipermudah dalam proses pelayanan atau pengurusan hibah ormas	ROO.26.05.206.18	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Melakukan sistem reward dan punishman terhadap pegawai berprestasi ataupun pegawai yang menyimpang	Maret 2026	Maret 2026	-
19	Risiko Oprasional: Kebijakan teknis yang dirumuskan tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan sehingga kurang efektif dalam pencegahan dan penanganan konflik	ROO.26.05.206.19	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Menetapkan SOP pengumpulan dan verifikasi data wilayah. Menetapkan jadwal pembaruan data setiap bulan. Melakukan verifikasi silang dengan POLRES, KODIM, BIN, dan kecamatan.	Maret, Juni, September, Desember 2026)	Maret 2026	-

							Membentuk tim supervisi data untuk memastikan akurasi sebelum penyusunan kebijakan			
20	Resiko Kemitraan : Bahan Penyusunan kebijakan tidak lengkap atau tidak valid sehingga mengurangi kualitas analisis kewaspadaan	ROO.26.05.206.20	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	menyusun template data, menerapkan deadline wajib lapor, kalender koordinas, penanggung jawab dari tiap instansi	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret 2026	-
21	Resiko Kemitraan : koordinasi lintas sektor tidak efektif sehingga informasi kewaspadaan dan analisis menjadi tidak akurat	ROO.26.05.206.21	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	membuat agenda koordinasi tetap, format masukan wajib, daftar hadir wajib, evaluasi tindak lanjut hasil rapat	12 Bulan (Januari-Desember 2026)	Januari-Maret 2026	-
22	Risiko Oprasional: Terlambatnya informasi monitoring wilayah	ROO.26.05.206.22	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Koordinasi dan bekerjasama dengan jajaran samping instansi vertikal seperti KODIM, POLRES, BIN, dan lainnya dalam monitoring wilayah	1 Bulan sekali (Januari-Desember)	Januari-Maret 2026	-
23	Resiko Fraud : manipulasi data pelaporan hasil monitoring	ROO.26.05.206.23	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Mengimplementasikan sistem pelaporan digital dengan fitur identitas penginput dan catatan perubahan. Melakukan verifikasi silang rutin dengan KODIM, POLRES, BIN, dan perangkat kecamatan. Mewajibkan dua tingkat verifikasi (petugas + koordinator). Mengadakan pelatihan integritas dan anti-fraud bagi seluruh petugas monitoring. Membuat SOP baru tentang pencegahan manipulasi data pelaporan.	12 Bulan (Januari-Desember 2026)	Januari-Maret 2026	-
24	Risiko Oprasional: dokumen hasil rapat forkopimda tidak menggambarkan kondisi nyata sehingga keputusan pimpinan daerah kurang tepat	ROO.26.05.206.24	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	menetapkan format baku laporan, jadwal pengumpulan bahan, rencana tindak lanjut	12 Bulan (Januari-Desember 2026)	Januari-Maret 2026	-
25	Risiko Oprasional: Pelaporan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada sistem informasi pelaporan tidak optimal	ROO.26.05.206.25	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Melakukan back up data pelaporan kinerja Perangkat Daerah untuk mengantisipasi kerusakan data pada aplikasi	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret 2026	-
26	Risiko Oprasional: Keterlambatan pengumpulan bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan dari bidang-bidang	ROO.26.05.206.26	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Menetapkan jadwal resmi dan wajib dan update data perbulan	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret 2026	-
27	Resiko Fraud : Mark Up data realisasi kinerja	ROO.26.05.206.27	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Melakukan punishment	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret 2026	-
28	Resiko kemitraan : ketidaksinkronan permintaan data klasifikasi dari pihak ketiga (BPS) dengan data di OPD	ROO.26.05.206.28	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Meminta desk dengan BPS untuk menyamakan persepsi dan klasifikasi data	Juni dan Desember 2026	-	-
29	Risiko Oprasional: Penyerapan anggaran tidak tepat waktu dan kurang maksimal	ROO.26.05.206.29	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Optimalisasi penyusunan rencana anggaran kas dan jadwal rencana kegiatan.	Agustus 2026	-	-

30	Risiko Kemitraan: Keterlambatan pengiriman Rekom dari OPD Induk untuk pencairan TPP	ROO.26.05.206.30	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Memberikan pengertian kepada PNS Perangkat Daerah	Setiap Bulan 2026	-	Bila terjadi Keterlambatan
31	Risiko Fraud: Mencatat belanja yang tidak dilakukan agar anggarannya "terpakai"	ROO.26.05.206.31	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	1. Penandatanganan pakta integritas 2. Mewajibkan adanya data dukung berupa foto yang terdapat keterangan lokasi dan waktu	Setiap Bulan 2026	Januari 2026	-
32	Risiko Oprasional: Laporan pertanggungjawaban atau dokumen pendukung tidak tepat waktu	ROO.26.05.206.32	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Optimalisasi penyetoran SPJ dan jadwal kegiatan	Setiap Bulan 2026	Januari-Maret 2026	-
33	Risiko Oprasional: Rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai	ROO.26.05.206.33	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Menyusun dan menerapkan mekanisme sanksi dan reward yang jelas, termasuk kategori pelanggaran, jenis sanksi, dan bentuk penghargaan bagi pegawai disiplin	Februari 2026	Januari 2026	-
34	Resiko Fraud: Pengadaan pakaian dinas yang tidak sesuai spesifikasi	ROO.26.05.206.34	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Melakukan evaluasi penyusunan rencana kerja pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	April 2026	-	-
35	Risiko Kemitraan: Mitra tidak mampu memenuhi kebutuhan teknis unit kerja	ROO.26.05.206.35	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	1. Melibatkan seluruh sub bidang dan pejabat pengelola Kepegawaian pada pertemuan koordinasi tertentu untuk mengusulkan kebutuhan diklat dan pelatihan kepada BKPSDM 2. Mengadakan pelatihan dan diklat mandiri untuk seluruh pegawai	Maret dan November 2026	Maret 2026	-
36	Risiko Operasional: Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal	ROO.26.05.206.36	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Pembinaan pegawai internal secara berkala.	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret 2026	-
37	Risiko Operasional: Kualitas komponen yang tidak standar (berisiko menimbulkan bahaya)	ROO.26.05.206.37	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Menjaga cadangan komponen listrik	Juni 2026	-	-
38	Risiko Operasional: Proses pengadaan yang lama	ROO.26.05.206.38	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Menyusun laporan kondisi barang untuk memberikan rekomendasi kepada pimpinan terkait keberlanjutan penggunaan alat lama	Juni 2026	-	-
39	Risiko Fraud: Pembuatan permintaan pembelian atau SPJ fiktif barang yang tidak pernah diterima atau digunakan oleh kantor	ROO.26.05.206.39	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Pencocokan data dukung berupa barang yang diterima beserta bukti fotonya	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret 2026	-
40	Risiko Fraud: Penyalahgunaan dalam proses penyediaan barang, seperti memanipulasi jumlah dan penggunaan barang untuk kepentingan pribadi	ROO.26.05.206.40	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Melakukan audit pemakaian barang secara berkala, termasuk perbandingan permintaan dengan pemakaian	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret 2026	-
41	Risiko Kemitraan: Penyedia melakukan perubahan data rekening pembayaran tanpa konfirmasi	ROO.26.05.206.41	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Menerapkan verifikasi dua arah dan setiap informasi perubahan rekening harus disampaikan secara resmi	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret 2026	-
42	Risiko Operasional: Dokumen perjalanan dinas tidak lengkap	ROO.26.05.206.42	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Memeriksa kelengkapan dokumen sebelum menyetujui pembayaran atau reimbursement	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret 2026	-

43	Risiko Operasional: Kebutuhan sarana dan prasarana kantor belum sepenuhnya terakomodir	ROO.26.05.206.43	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Memanfaatkan secara optimal sarana prasarana kantor yang tersedia serta ditunjang dengan kolaborasi dengan pihak terkait	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret 2026	-
44	Risiko Fraud: Merubah atau menurunkan spesifikasi teknis barang/jasa yang akan dibeli sementara nilai (harga) tidak berubah	ROO.26.05.206.44	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Melakukan verifikasi berjenjang	Januari 2026	Januari 2026	-
45	Risiko Operasional : Menetapkan barang yang tidak sesuai kebutuhan di DPA	ROO.26.05.206.45	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Memeriksa persediaan barang berdasarkan kondisi barang yang rusak	Juni 2026	-	-
46	Risiko Kemitraan :Penyedia memberikan Barang yang tidak sesuai pesanan	ROO.26.05.206.46	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Melakukan retur barang sesuai dengan pesanan	Maret, Juni, September, Desember 2026	Maret 2026	-
47	Risiko Operasional: Pelaksanaan layanan penunjang pemerintah daerah belum optimal	ROO.26.05.206.47	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Juni 2026	-	-
48	Risiko Operasional :Adanya Keterlambatan Pembayaran	ROO.26.05.206.48	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Komunikasi koordinasi internal	Februari 2026	Februari 2026	-
49	Risiko Fraud : Menciptakan kerusakan baru atau melebih-lebihkan tingkat kerusakan agar biaya perbaikan meningkat	ROO.26.05.206.49	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Menggunakan checklist standar agar penilaian kerusakan objektif	Setiap Bulan	Maret 2026	-
50	Risiko Kemitraan : Tenaga kebersihan kurang kompeten	ROO.26.05.206.50	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Melakukan komplain kepada vendor untuk mengganti dengan tenaga yang kompeten	Juni 2026	-	-
51	Risiko Oprasional: Sarana dan prasarana penunjang kantor kurang terpelihara	ROO.26.05.206.51	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Pembinaan pegawai oleh atasan langsung terkait tugas dan tanggungjawabnya.	Januari 2026	Januari 2026	-
52	Risiko Fraud: Penyedia jasa membuat tagihan lebih tinggi dari biaya sebenarnya atau menagih servis yang tidak pernah dilakukan	ROO.26.05.206.52	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Mewajibkan bukti laporan pekerjaan yang lengkap, detail, dan sesuai standar sebagai syarat pembayaran	Setiap Bulan	Maret 2026	-
53	Risiko Operasional: Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.05.206.53	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Pemeliharaan preventif dan korektif dan penanggung jawab yang jelas	Februari 2026	Februari 2026	-
54	Risiko Kemitraan : Penyedia Tidak memiliki tenaga ahli yang memadai	ROO.26.05.206.54	-	-	-	Tidak Terjadi Risiko	Meminta pertanggung jawaban ke pihak vendor atau penyedia	Oktober 2026	-	-

Lampiran 1.3 Daftar Risiko Strategis Prioritas Tahun 2026

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD							
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Terjadi konflik berulang memperdalam polarisasi antar kelompok	RSO.26.05.206.01	9	Kepala Bakesbangpol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masalah mendasar belum teratasi sepenuhnya 2. Salah satu pihak merasa dirugikan oleh hasil mediasi atau merasa dipaksa untuk setuju 3. Masih ada ketidak hadirannya ruang komunikasi yang efektif 	Konflik menjadi besar dan menimbulkan keresahan masyarakat karena terganggunya keamanan dan ketertiban
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan tema kegiatan	RSO.26.05.206.02	2	Kepala Bakesbangpol	Permintaan materi kurang spesifik	Pemahaman peserta terkait pendidikan politik tidak mengalami peningkatan
3	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Oprasional: Rendahnya partisipasi kelompok rentan (difabel, lansia)	RSO.26.05.206.03	6	Kepala Bakesbangpol	Akses informasi dan fasilitas terbatas	Ketimpangan partisipasi
4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Rendahnya partisipasi pemilih pemula	RSO.26.05.206.04	6	Kepala Bakesbangpol	Rendahnya ketertarikan masyarakat pemula dalam partisipasi politik	Potensi kehilangan pemilih masa depan
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Rendahnya partisipasi pemilih secara umum	RSO.26.05.206.05	7	Kepala Bakesbangpol	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilu	Target partisipasi pemilih tidak tercapai
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Jumlah responden tidak tercapai	RSO.26.05.206.06	5	Kepala Bakesbangpol	Masyarakat tidak mengetahui adanya survey kepuasan masyarakat terhadap layanan	Kevalidan hasil SKM diragukan
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Implementasi sistem akuntabilitas kinerja internal pemerintah belum berjalan optimal	RSO.26.05.206.07	7	Kepala Bakesbangpol	Pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal	Kurang efektif dan efisiennya penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Kemitraan: Pelaporan penyusunan manajemen resiko pada sistem informasi pelaporan yang disediakan mitra OPD tidak optimal	RSO.26.05.206.08	10	Kepala Bakesbangpol	Kurang optimalnya sistem informasi pelaporan manajemen resiko yang stabil dan terintegrasi (data hilang)	Proses pelaporan manajemen resiko Perangkat Daerah tidak efektif dan efisien

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Penerapan manajemen risiko masih belum optimal	RSO.26.05.206.09	6	Kepala Bakesbangpol	Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya manajemen risiko organisasi	Efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan terhambat

Lampiran 1.4 Daftar Risiko Operasional Prioritas Tahun 2026

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Jumlah laporan tidak sesuai target	ROO.26.05.206.01	3	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kurangnya kompetensi pegawai	Perumusan kebijakan teknis menjadi kurang maksimal
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan	ROO.26.05.206.02	4	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Alun-Alun digunakan untuk kegiatan lain	Persiapan pelaksanaan Upacara menjadi terganggu
3	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan	ROO.26.05.206.03	5	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Adanya Instruksi BPIP yang secara mendadak mengubah jadwal pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila	Persiapan pelaksanaan Upacara menjadi terganggu
4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Kemitraan: Keterbatasan kemampuan mitra	ROO.26.05.206.04	5	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kepengurusan DPPI hanya berjumlah 7 orang dan masing-masing memiliki kesibukan tersendiri	Tidak ada yang mengampu Paskibraka selama latihan dan bertugas

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Kurangnya minat peserta yang mendaftar untuk mengikuti sosialisasi	ROO.26.05.206.05	4	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Peserta yang mendaftar kurang dari target yang telah ditentukan	Sosialisasi terlihat sepi; Indikator kinerja terkait jumlah orang yang mengikuti kegiatan menjadi tidak tercapai
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Fraud: Terdapat peserta paskibraka yang tidak sesuai dengan kriteria	ROO.26.05.206.06	4	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Terdapat panitia seleksi yang meloloskan calon anggota paskibraka yang tidak sesuai kriteria atas dasar kepentingan pribadi	Timbulnya kesenjangan sosial dan menurunnya kredibilitas dalam seleksi paskibraka
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Jumlah laporan tidak sesuai target	ROO.26.05.206.07	3	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kurangnya kompetensi pegawai	Perumusan kebijakan teknis menjadi kurang maksimal
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Narasumber yang diminta tidak bisa hadir	ROO.26.05.206.08	3	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Adanya alasan tertentu atau force majeure sehingga narasumber tidak bisa hadir	Materi yang disampaikan terkadang tidak sesuai

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Fraud: Spesifikasi alkes tidak sesuai dengan perjanjian	ROO.26.05.206.09	5	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Wording yang ambigu menyebabkan interpretasi berbeda dengan penyedia	Alkes yang datang tidak sesuai spesifikasi
10	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Belum terinventarisir secara menyeluruh keberadaan aliran kepercayaan	ROO.26.05.206.10	8	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kurang optimalnya sosialisasi terhadap PB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata dan Menteri Dalam Negeri	Data Penghayat kepercayaan tidak terdeteksi sehingga timbulnya kegiatan penghayat kepercayaan yang meresahkan masyarakat karena tidak ada pengawasan
11	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Kemitraan: Kurang maksimalnya kinerja mitra	ROO.26.05.206.11	4	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kurangnya koordinasi antara Bakesbangpol dengan MLKI	Bakesbangpol tidak memiliki data penghayat kepercayaan yang pasti
12	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Oprasional: Jumlah peserta tidak memenuhi target	ROO.26.05.206.12	7	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam renstra	Target keluaran tidak tercapai
13	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko Kemitraan: Ditemukan Ketidaksesuaian prosentase alokasi kegiatan bersumber dana hibah parpol	ROO.26.05.206.13	5	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Kurang pahamnya pemahaman aturan penggunaan alokasi dana hibah	Kerugian negara

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko Fraud : Laporan Hasil Monitoring dibuat tanpa turun ke lapangan (mark up kunjungan)	ROO.26.05.206.14	4	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Tidak adanya mekanisme verifikasi lapangan	Kegagalan Program
15	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko Kemitraan: Terdapat Ormas yang melakukan tindakan tidak sesuai ataupun melenceng dengan tupoksinya	ROO.26.05.206.15	9	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Kurang fahamnya Ormas terhadap Tupoksinya sebagai mitra pemerintah dalam menunjang pembangunan	Merusak tatanan sosial dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko Operasional : Keterlambatan/lamanya penerbitan surat tanggapan keberadaan ormas	ROO.26.05.206.16	3	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Ormas tidak dapat memenuhi berkas persyaratan	Ormas tidak terdaftar
17	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko Fraud : Intervensi bahan kebijakan oleh pihak eksternal	ROO.26.05.206.17	4	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Ormas Bergerak dibidang yang rentan terhadap kepentingan politik	Citra Pemerintah Daerah menjadi negatif
18	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko Fraud: Pemberian imbalan atau hadiah/gratifikasi agar didahulukan/dipermudah dalam proses pelayanan atau pengurusan hibah ormas	ROO.26.05.206.18	4	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Kebiasaan masyarakat untuk memberikan hadiah sebagai ucapan terimakasih	Ketidapercayaan masyarakat terhadap komitmen pelayanan publik
19	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Oprasional: Kebijakan teknis yang dirumuskan tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan sehingga kurang efektif dalam pencegahan dan penanganan konflik	ROO.26.05.206.19	6	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme pengumpulan data wilayah tidak konsisten. 2. Laporan situasi sosial terlambat diterima. 3. Tidak ada verifikasi silang yang memadai antarinstansi. 4. Sistem pelaporan masih manual sehingga rawan ketidakakuratan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan teknis tidak tepat sasaran. 2. Antisipasi kerawanan sosial melemah. 3. Potensi konflik tidak tertangani secara optimal 4. Pemerintah daerah kehilangan ketepatan bukti dalam pengambilan keputusan.
20	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko Kemitraan : Bahan Penyusunan kebijakan tidak lengkap atau tidak valid sehingga mengurangi kualitas analisis kewaspadaan	ROO.26.05.206.20	6	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik	Tidak ada aturan wajib lapor, data dari instansi eksternal tidak seragam, lemahnya follow up permintaan data	Analisis kewaspadaan menjadi dangkal, potensi kerawanan tidak teridentifikasi, kebijakan kehilangan dasar empiris
21	Badan Kesatuan	Resiko Kemitraan : koordinasi lintas sektor	ROO.26.05.206.21	4	Kepala Bidang	Tidak ada kewajiban hadir, jadwal	Potensi kerawanan tidak terbaca,

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
22	Bangsa Dan Politik Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	tidak efektif sehingga informasi kewaspadaan dan analisis menjadi tidak akurat Risiko Oprasional: Terlambatnya informasi monitoring wilayah	ROO.26.05.206.22	7	Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik	koordinasi tidak diprioritaskan instansi, tidak ada sistem tindak lanjut rapat Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten	informasi simpang siur Kesulitan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat dalam mendeteksi konflik
23	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko Fraud : manipulasi data pelaporan hasil monitoring	ROO.26.05.206.23	4	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik	1. Tidak adanya mekanisme verifikasi silang antara laporan petugas dan laporan instansi vertikal. 2. Kurangnya pengawasan terhadap operator penginput data. 3. Sistem pelaporan masih manual sehingga rawan dimodifikasi. 4. Keterbatasan SDM sehingga kualitas pengawasan tidak konsisten	1. Informasi kewaspadaan menjadi tidak akurat dan menyesatkan. 2. Pemerintah daerah sulit mengambil keputusan berbasis bukti. 3. Potensi konflik tidak terdeteksi, berpotensi meningkat karena fakta lapangan tidak dilaporkan. 4. Hilangnya integritas data dan kepercayaan antarinstansi
24	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Oprasional: dokumen hasil rapat forkopimda tidak menggambarkan kondisi nyata sehingga keputusan pimpinan daerah kurang tepat	ROO.26.05.206.24	4	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik	Format laporan tidak seragam, tidak ada verifikasi bahan sebelum rapat	Rekomendasi forkopimda tidak akurat, arah kebijakan bisa salah, respon terhadap ancaman lokal melemah
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Oprasional: Pelaporan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada sistem informasi pelaporan tidak optimal	ROO.26.05.206.25	7	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Kurang optimalnya sistem informasi pelaporan dan pemantauan kinerja Perangkat Daerah yang tidak terintegrasi	Proses pelaporan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tidak efektif dan efisien
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Oprasional: Keterlambatan pengumpulan bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan dari bidang-bidang	ROO.26.05.206.26	4	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Kurangnya disiplin waktu dan tidak adanya timeline yang jelas atau perubahan jadwal secara mendadak	Proses penyusunan dokumen perencanaan terlambat selesai
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko Fraud : Mark Up data realisasi kinerja	ROO.26.05.206.27	5	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Kekhawatiran berkurangnya tunjangan performa kinerja (TPP)	Hasil SAKIP kurang dapat dipertanggungjawabkan
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko kemitraan : ketidaksinkronan permintaan data klasifikasi dari pihak ketiga (BPS) dengan data di OPD	ROO.26.05.206.28	8	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Belum pernah adanya sosialisasi klasifikasi data dari pihak ketiga	Data bias tidak bisa digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
29	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Oprasional: Penyerapan anggaran tidak tepat waktu dan kurang maksimal	ROO.26.05.206.29	8	Kasubbag Keuangan	Kurangnya koordinasi dan komitmen antar instansi dalam penyusunan rencana anggaran dan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran menjadi terhambat dan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan
30	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Kemitraan: Keterlambatan pengiriman Rekom dari OPD Induk untuk pencairan TPP	ROO.26.05.206.30	9	Kasubbag Keuangan	Keterlambatan pengiriman rekom dari BPKD	Pegawai tidak menerima TPP tepat waktu
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Fraud: Mencatat belanja yang tidak dilakukan agar anggarannya "terpakai"	ROO.26.05.206.31	4	Kasubbag Keuangan	Target kinerja SKPD dikaitkan dengan tingkat penyerapan anggaran.	Belanja barang habis pakai yang tidak pernah diterima SKPD sehingga laporan akhir tahun dapat tepat waktu penyelesaiannya
32	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Oprasional: laporan pertanggungjawaban atau dokumen pendukung tidak tepat waktu	ROO.26.05.206.32	6	Kasubbag Keuangan	Tidak ada mekanisme kontrol penyampaian dokumen (jadwal, daftar cek, atau verifikasi kelengkapan)	Laporan bulanan/triwulan/semester terlambat dikompilasi
33	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Oprasional: Rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai	ROO.26.05.206.33	5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tidak adanya penerapan sanksi dan reward sehingga pegawai mengabaikan kedisiplinan	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan hingga menurunnya efektivitas kinerja organisasi
34	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko Fraud: Pengadaan pakaian dinas yang tidak sesuai spesifikasi	ROO.26.05.206.34	3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya pengendalian terhadap proses dan hasil	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya tidak sesuai standar
35	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Kemitraan: Mitra tidak mampu memenuhi kebutuhan teknis unit kerja	ROO.26.05.206.35	4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> Materi diklat dari mitra mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan teknis tiao unit kerja Ketergantungan tinggi pada pihak ketiga (perguruan tinggi atau lembaga diklat lain) yang dapat menghambat fleksibilitas organisasi dalam meningkatkan kemampuan pegawai secara mandiri 	Terjadi ketidaksesuaian kompetensi pegawai dengan tugas dan fungsi jabatan
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal	ROO.26.05.206.36	7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kebutuhan layanan administrasi belum sepenuhnya terakomodir	Pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang menjadi kurang maksimal
37	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Kualitas kompenen yang tidak standar (berisiko menimbulkan bahaya)	ROO.26.05.206.37	4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya pengendalian terhadap proses dan hasil	Pelayanan masyarakat terganggu

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
38	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Proses pengadaan yang lama	ROO.26.05.206.38	8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> Kesalahan dalam merencanakan kas budget Kerusakan peralatan secara bersamaan sehingga membutuhkan proses lebih untuk memisahkan mana yang urgent 	Pelayanan internal menjadi tidak efektif
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Fraud: Pembuatan permintaan pembelian atau SPJ fiktif barang yang tidak pernah diterima atau digunakan oleh kantor	ROO.26.05.206.39	3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya pengendalian terhadap proses dan hasil	Kerugian negara
40	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Fraud: Penyalahgunaan dalam proses penyediaan barang, seperti memanipulasi jumlah dan penggunaan barang untuk kepentingan pribadi	ROO.26.05.206.40	3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya pengawasan dan pemakaian barang secara berkala	Pemborosan anggaran dan potensi kerugian
41	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Kemitraan: Penyedia melakukan perubahan data rekening pembayaran tanpa konfirmasi	ROO.26.05.206.41	5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tidak adanya prosedur double check dan verifikasi ulang terhadap rekening tujuan pembayaran	Pembayaran salah transfer ke rekening yang tidak sah atau tidak sesuai kontrak.
42	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Dokumen perjalanan dinas tidak lengkap	ROO.26.05.206.42	5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dokumen pendukung hilang, rusak, atau terlambat diterima	Temuan audit terkait kelengkapan dokumen
43	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Kebutuhan sarana dan prasarana kantor belum sepenuhnya terakomodir	ROO.26.05.206.43	11	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Keterbatasan alokasi anggaran untuk mencukupi prioritas kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Pelayanan yang diberikan menjadi kurang maksimal
44	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko Fraud: Merubah atau menurunkan spesifikasi teknis barang/jasa yang akan dibeli sementara nilai (harga) tidak berubah	ROO.26.05.206.44	4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya pengendalian terhadap proses dan hasil	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan kebutuhan
45	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko Operasional : Menetapkan barang yang tidak sesuai kebutuhan di DPA	ROO.26.05.206.45	4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	kurangnya komunikasi antar pegawai terhadap kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Tidak terpakainya barang yang telah dibeli
46	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko Kemitraan :Penyedia memberikan Barang yang tidak sesuai pesanan	ROO.26.05.206.46	4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurang adanya pemantauan saat proses pesanan	Kualitas barang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga pelayanan menjadi kurang efektif dan efisien
47	Badan Kesatuan	Risiko Operasional: Pelaksanaan layanan	ROO.26.05.206.47	6	Kasubbag Umum	Kurang koordinasi internal	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
48	Bangsa Dan Politik	penunjang pemerintah daerah belum optimal			dan Kepegawaian		
	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko Operasional :Adanya Keterlambatan Pembayaran	ROO.26.05.206.48	3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Petugas lalai dalam melakukan pembayaran	Terjadi pemutusan sementara
49	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko Fraud : Menciptakan kerusakan baru atau lebih-lebihkan tingkat kerusakan agar biaya perbaikan meningkat	ROO.26.05.206.49	3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar	Merusak hubungan antara pelanggan dan penyedia jasa.
50	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko Kemitraan : Tenaga kebersihan kurang kompeten	ROO.26.05.206.50	6	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Vendor tidak memberikan pelatihan yang cukup kepada pekerjanya	Kantor kurang bersih sehingga produktivitas dan kenyamanan kerja berkurang
51	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Oprasional: Sarana dan prasarana penunjang kantor kurang terpelihara	ROO.26.05.206.51	7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Rendahnya kepedulian pegawai untuk memelihara sarana dan prasarana penunjang kantor	Terhambatnya pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang
52	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Fraud: Penyedia jasa membuat tagihan lebih tinggi dari biaya sebenarnya atau menagih servis yang tidak pernah dilakukan	ROO.26.05.206.52	5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan sehingga dimanfaatkan oleh penyedia jasa pihak ketiga untuk memaksimalkan profit dan mencari keuntungan	Anggaran dibayarkan lebih besar daripada nilai pekerjaan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian
53	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.05.206.53	7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Terlalu banyaknya peralatan dan mesin yang rusak karena penggunaan terus menerus sehingga mudah rusak	Peralatan dan mesin belum terpelihara secara menyeluruh sehingga menghambat pekerjaan
54	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko Kemitraan : Penyedia Tidak memiliki tenaga ahli yang memadai	ROO.26.05.206.54	6	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Penyedia tidak merekrutmen tenaga ahli yang kompeten dan atau tidak memberikan pelatihan yang cukup kepada pekerjanya	Terjadinya keterlambatan pekerjaan